

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan musuh bersama setiap negara, karena hal ini sudah menjadi fenomena mendunia yang berdampak pada seluruh sektor. Tidak hanya lembaga eksekutif tersandung kasus korupsi, yang sekiranya memiliki kesempatan sebagai pengelola anggaran, bahkan legislatif dan yudikatif yang memiliki peran untuk mengawasi dan mengadili eksekutif ikut terjerumus dalam korupsi itu sendiri.

Menurut Alatas (1987) dalam Lubis (2008) korupsi yang mewabah di berbagai negara yang sedang berkembang adalah karena tidak cukupnya gaji pegawai negeri. Ketidacukupan ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya perencanaan yang buruk. Kondisi-kondisi struktural dan lingkungan adalah sarana bagi koruptor untuk melaksanakan perbuatannya. Mereka telah terbiasa melakukan korupsi kerap menciptakan lingkungan dan kondisi yang cocok bagi korupsi. Pengaruhnya merusak masyarakat dan akan berlangsung berabad-abad. Mereka dapat hidup dengan suburnya pada semua sistem dan di segala waktu.

Ketidacukupan gaji pegawai akan menyebabkan seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, hingga menodorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Namun tidak hanya masalah kebutuhan saja yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, bila kita lihat di media cetak dan elektronik yang menjadi tersangka kasus korupsi adalah pejabat, yang sekiranya sudah bisa memenuhi kebutuhan. Bahkan sudah bisa dikatakan melebihi dari kebutuhannya. Bila kita analisis lebih dalam kasus yang menjerat pejabat tersebut melakukan

tindakan pidana korupsi tidak lain dan tidak bukan adalah karena sifat keserakahannya.

Selain itu lemahnya sistem dalam tata kelola pemerintah dalam urusan birokrasi juga menjadi faktor yang menyebabkan korupsi itu ada. Jika tata kelola pemerintah yang baik akan menciptakan peluang korupsi itu kecil, sehingga perilaku korupsi akan menjadi kecil. Menurut Klitgard (1998, 2000) dalam Waluyo (2002) mengatakan bahwasanya korupsi yang terjadi di negara berkembang akibat lemahnya birokrasi dan penegakan hukum.

Uni Afrika memperkirakan korupsi di wilayahnya sekitar 25% dari GDP-nya (Nawatmi, 2014). Secara keseluruhan korupsi mengurangi efisiensi dan meningkatkan kesenjangan. Menurut *World Economic Forum* diduga bahwa biaya korupsi sebesar 5% dari GDP global atau sebesar 2,6 triliun US\$ dan *World Bank* memperkirakan bahwa praktek suap lebih dari 1 triliun US\$ per tahun. Sehingga korupsi tidak hanya masalah etika, tapi ini juga menyangkut masalah pemborosan.

Untuk mengukur perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan politisi maka digunakanlah indeks persepsi korupsi (IPK). Hal ini dikarenakan tidak mungkin menilai korupsi, karena korupsi terjadi secara sembunyi-sembunyi. Indeks ini dibuat bertujuan sejauh mana negara ini melangkah dalam proses pemberantasan korupsi. IPK adalah instrumen pengukuran korupsi global yang dikembangkan oleh *Transparency International* (TI) sejak tahun 1995. IPK tidak dihasilkan dari survei yang dilakukan oleh TI sendiri. Melainkan IPK merupakan indeks gabungan (*composite index*) dari beberapa indeks yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga internasional. IPK memiliki rentang 0 sampai 100, dimana 0 berarti dipersepsikan

sangat korup, sementara 100 dipersepsikan sangat bersih, berikut IPK Negara-negara Asean :

Tabel 1.1 Indeks Persepsi Korupsi Negara (IPK) Asean-9 Tahun 2009-2013 :

No	Negara	2009	2010	2011	2012	2013
1	Singapura	92	93	92	87	86
2	Brunei	55	55	52	55	60
3	Malaysia	45	44	43	49	50
4	Thailand	34	35	34	37	35
5	Filipina	24	24	26	34	36
6	Indonesia	28	28	30	32	32
7	Vietnam	27	27	29	31	31
8	Laos	20	21	22	21	26
9	Kamboja	20	21	21	22	20
Rata-rata umum		38,3	38,7	38,8	40,9	41,8

Sumber : *Transparency International* (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata negara sulit untuk mengalami peningkatan yang signifikan. Rata-rata peningkatan ataupun penurunan negara hanya beberapa point saja. Hanya Brunei Darussalam pada tahun 2012-2013 dan Laos 2012-2013 yang memiliki peningkatan yang drastis. Bahkan Kamboja bisa dikatakan tidak mengalami peningkatan.

Dari tabel 1.1 jika melihat rata-rata umum dari kesembilan negara Asean cenderung terjadi peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011-2012 sebesar 2,1 poin, disusul tahun 2012-2013 sebesar 0,9 poin, seterusnya tahun 2009-

2010 sebesar 0,4 poin dan terakhir tahun 2011-2012 sebesar 0,1 poin. Sedangkan Indonesia jika dirata-ratakan hanya mengalami peningkatan sebesar 0,5 point tiap tahun, walaupun belum masih dianggap membanggakan namun tetap ada perubahan kearah yang lebih baik.

Dari sembilan negara Asean hanya Singapura dan Brunei Darussalam memiliki IPK diatas atau sama 50, bisa dikatakan prilaku korupsi di dua negara ini lebih minim dibandingkan negara-negara lain. Namun ada kesan bahwasanya kurang lebih 77,8% Negara-negara di Asean masuk dalam kategori IPK di bawah 50. Artinya Negara-negara di Asean masih rentan akan prilaku korupsi.

Menurut Myin (2000) dalam Novienda (2012), meningkatnya kepentingan umum dan keprihatinan terhadap korupsi telah menghasilkan sejumlah penelitian pada subjek korupsi. Memang, masih terdapat kelemahan/kekurangan dalam informasi dan pengetahuan tentang masalah korupsi dan banyak lagi yang yang masih harus dilakukan oleh para peneliti. Namun demikian, penelitian teoritis dan penelitian empiris yang telah dilakukan sejauh ini telah menghasilkan wawasan besar dalam masalah korupsi. Myin menyebutkan bahwa ada kekhawatiran diseluruh dunia atas timbulnya tindakan korupsi yang terjadi saat ini dimana korupsi dinilai sebagai masalah universal. Korupsi terjadi di semua negara, disektor publik dan swasta, serta dalam organisasi non-profit atau nirlaba. Negara-negara di Asia Pasifik juga sangat mengkhawatirkan tentang masalah korupsi dan mereka secara substansial mengatakan bahwa korupsi merupakan kendala utama yang menghambat ekonomi negara, politik dan pembangunan nasional.

Menurut Mauro (1997) menunjukkan bahwa tingginya tingkat korupsi akan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah terutama dibidang jaminan sosial

dan pembayaran kesejahteraan publik (social security and welfare payments). Penelitian Mauro menunjukkan bahwa korupsi memberikan konsekuensi antara lain: *Pertama*, melemahkan investasi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi berkurang. Beberapa pengusaha menganggap bahwasanya biaya korupsi dianggap biaya tambahan yang memberatkan. *Kedua* terjadinya talent miss allocated. Artinya akan ada orang yang bukan ditempatkan pada tempatnya akibat korupsi. *Ketiga* aliran pinjaman dan hibah dari luar negeri mengalami *missallocation*. Perihal ini sering terjadi pada beberapa tempat khususnya negara-negara berkembang. *Keempat* melemahnya penerimaan pemerintah dari pajak, sehingga akan mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah. Hal ini akan justru mempengaruhi keadaan pasar. Menurut penelitian yang dilakukan Mauro (1995, 1997, 2004) dengan studi antar lintas negara, menunjukkan bahwa korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan merusak investasi yang ada. Artinya jika korupsi meningkat maka investasi domestik akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan.

Tindakan korupsi juga bisa menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi bilamana birokrat dan atau kepala daerah bermental koruptif. Bila dana yang telah dianggarkan tidak digunakan, dikarenakan penyelenggara dana tidak mendapatkan apa-apa dalam anggaran itu. Ini akan menyebabkan daya serap anggaran akan menjadi terganggu, yang akhirnya akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut penelitian yang dilakukan Brempong (2002) bahwa korupsi menurunkan pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui pelemahan investasi dibidang infrastruktur. Kenaikan satu unit korupsi

menurunkan tingkat pertumbuhan GDP dan pendapatan perkapita antara 0,75 dan 0,9 point persen dan antara 0,39 dan 0,41 point persen per tahun.

Namun di balik itu semua, tidak semua korupsi itu berdampak pada buruk pada perekonomian. Menurut Leff (1964) dan Huntington (1968) dalam Waluyo (2010) mengindikasikan bahwa korupsi tidak berdampak buruk terhadap perekonomian. Korupsi yang bersifat “speed money” berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumen yang dikemukakan yaitu dengan keberadaan suap maka para pengusaha terhindar dari adanya penundaan birokrasi, sehingga semua urusan dengan birokrasi akan berjalan lancar yang berdampak terhadap semua kegiatan usaha berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan Klitgaard (2001) dalam Waluyo (2010) tersedianya “dana taktis” pimpinan birokrat kadang-kadang diperlukan untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianda (2012) bahwasanya korupsi dengan sendirinya faktor yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada negara maju korupsi berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada negara berkembang korupsi berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan memberikan *trickle down effect* bagi perekonomian. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tentunya akan membuka lapangan kerja. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi secara langsung akan mengurangi pengangguran yang akan berdampak pada pengurangan pada angka kemiskinan yang ada di negara tersebut.

Berbagai hasil studi tersebut memunculkan pertanyaan besar tentang apakah korupsi menjadi variabel penting untuk meramalkan pendapatan nasional di Asean-9 ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya. Kejelasan hubungan tersebut sangat penting untuk menjelaskan apakah dan bagaimanakah hubungan tersebut dibutuhkan dalam suatu proses pembangunan.

Pada tahun 2016 beberapa Negara-Negara Asia Tenggara tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau dalam istilahnya Asean Economic Community (AEC), dimana pembentukan ini bertujuan agar meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN. Tentunya berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, ditambah akibat kelengkapan data dan jurnal yang dirujuk maka penelitian ini diberi judul : **Korupsi dan Pendapatan Nasional di Asean-9 2009-2013.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Apakah korupsi berpengaruh terhadap pendapatan nasional secara signifikan di Negara Asean-9?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap hubungan antara korupsi dan pendapatan nasional di Asean-9. Tujuan khusus dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Melakukan analisis pengaruh korupsi terhadap pendapatan negara di Asean-9.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di jurusan ilmu ekonomi, selain itu penulis ingin melihat perbandingan antara dua teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan.
2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan atau sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk pihak yang melakukan penelitian yang lebih lanjut.
3. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan dalam membuat kebijakan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisa pengaruh antara korupsi dan pendapatan nasional di Asean-9 pada tahun 2009-2013. Penelitian ini mengambil sampel sembilan negara Asean diantaranya: Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, Laos dan Kamboja. Sumber data variabel korupsi dan pendapatan nasional dari situs *Transparency International* dan *World Bank*. Sumber data lainnya berasal dari literatur dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari tingkat korupsi dan pendapatan nasional di Asean-9 2009-2013. Bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Literatur

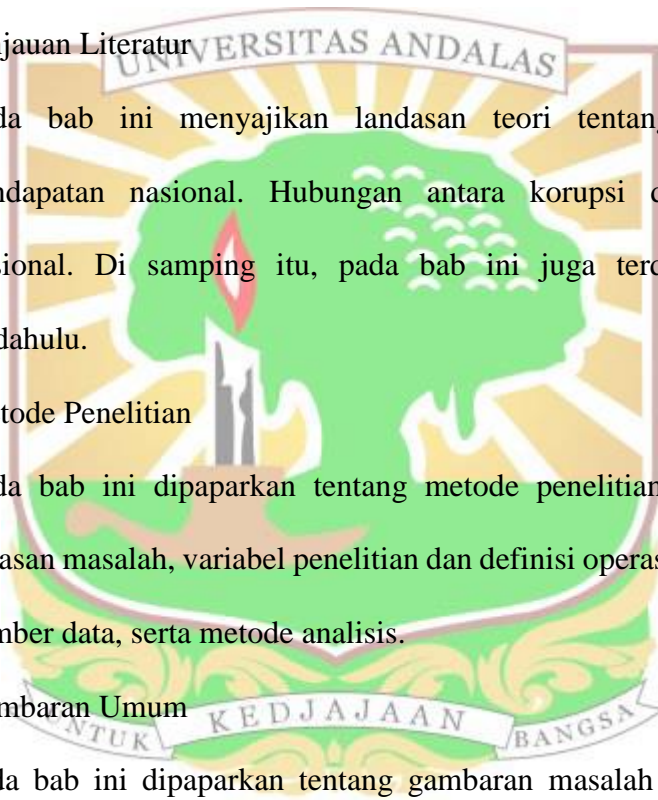
Pada bab ini menyajikan landasan teori tentang korupsi dan pendapatan nasional. Hubungan antara korupsi dan pendapatan nasional. Di samping itu, pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi batasan masalah, variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, serta metode analisis.

BAB IV : Gambaran Umum

Pada bab ini dipaparkan tentang gambaran masalah perihal korupsi dan pendapatan nasional di negara asean-9, yakni Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos dan Vietnam.



BAB V : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan hasil dari deskripsi objek penelitian dan analisa yang telah didapatkan dari hasil pengolahan data. Penjelasan hasil dimulai dari pemilihan model dan hasil estimasi.

BAB VI : Kesimpulan

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan atas rumusan masalah penelitian yang telah dilakukan.

